

BAB III
HUBUNGAN PARTAI MASYUMI DENGAN NU
PADA TAHUN 1945-1952

3.1. Hubungan Partai Masyumi dengan NU 1945-1949

Masyumi merupakan partai Islam yang dibentuk atas kesepakatan para pemuka umat Islam dalam Mukhtar Umat Islam Indonesia di Yogyakarta pada 7-8 November 1945. Partai ini ditujukan untuk menjadi satu-satunya badan perjuangan politik umat Islam. Masyumi yang didirikan dalam pelaksanaan Mukhtar Umat Islam Indonesia, berbeda dengan Masyumi pada era Pendudukan Jepang.¹⁴⁶ Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945,¹⁴⁷ sekali pun memiliki nama yang sama dengan Masyumi Jepang, ia merupakan partai politik yang dibentuk sebagai respon umat Islam terhadap Maklumat Wakil Presiden pada 3 November 1945 mengenai anjuran kepada rakyat Indonesia untuk membentuk partai politik.

Masyumi sebagai satu-satunya partai Islam berupaya untuk menghimpun, mengerahkan, dan memimpin perjuangan umat Islam. Partai Islam ini memberlakukan dua jenis keanggotaan partainya untuk maksud tersebut, yaitu

¹⁴⁶ Harry J. Benda menerangkan bahwa dibentuknya Masyumi pada era Pendudukan Jepang merupakan kemenangan politik Jepang atas umat Islam. Ia menerangkan bahwa keanggotaan Masyumi pada era Pendudukan Jepang hanya terbuka bagi organisasi-organisasi Islam yang tidak dibekukan oleh Pemerintahan Militer Jepang. Pada awalnya NU dan Muhammadiyah mendominasi struktur kepengurusan Masyumi yang dibentuk saat itu. Setiap kiai atau ulama secara perseorangan dapat menjadi bagian dari Masyumi atas persetujuan Shumubu. Benda menyatakan bahwa Masyumi memiliki keanggotaan yang meyakinkan di seluruh Pulau Jawa dan tumbuh menjadi kekuatan yang mengalahkan kelompok nasionalis. Lihat dalam Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, 1985, hlm. 185-186.

¹⁴⁷ Hari ulang tahun Masyumi diperingati setiap 7 November. Lihat dalam berbagai terbitan berkala yang berafiliasi pada Masyumi seperti *Hikmah*, *Suara Partai Masjumi*, *Abadi*, dan *Berita Masjumi*.

keanggotaan perseorangan dan keanggotaan istimewa. Keanggotaan istimewa merupakan anggota partai yang terdiri atas organisasi-organisasi Islam yang tidak berpolitik, karena jenis keanggotaan itu Masyumi dapat menjadi partai yang besar pada masa awal kemerdekaan. Jenis keanggotaan istimewa yang diberlakukan Masyumi secara sekilas nyaris sama dengan sifat keanggotaan Masyumi Jepang, akan tetapi, apabila dianalisis lebih jauh, hal itu pada dasarnya berbeda. Masyumi Jepang merupakan sebuah federasi bagi umat Islam yang didirikan oleh Pemerintah Militer Jepang. Federasi tersebut hanya diisi oleh beberapa pemuka NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam.¹⁴⁸ Masyumi Jepang dibentuk untuk memenuhi kepentingan politik Pemerintahan Militer Jepang, sedangkan hal tersebut berbeda dengan maksud dan tujuan Masyumi yang dibentuk dalam Muktamar Umat Islam Indonesia.

Masyumi sebagai partai Islam tunggal memperoleh dukungan yang cukup luar biasa dari beberapa organisasi Islam. Beberapa organisasi sosial keagamaan menyatakan diri menjadi anggota istimewa Masyumi. NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam sejak awal telah menyatakan diri sebagai anggota istimewa Masyumi. Hal serupa diikuti oleh organisasi sosial keagamaan lain. Persis bergabung menjadi anggota istimewa Masyumi pada 1948 dan Al-Irsyad pada 1950, sedangkan, organisasi sosial keagamaan dari Sumatra yaitu Al-Washliyah, Al-Ittihadiyah, dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) bergabung dengan Masyumi setelah hubungan antara Yogyakarta dan Sumatra

¹⁴⁸ Deliar Noer menerangkan bahwa NU dan Muhammadiyah disahkan oleh Pemerintah Militer Jepang pada 10 September 1943, sedangkan, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam disahkan oleh Pemerintah Militer Jepang pada 1 Februari 1944. Noer, *op cit*, hlm. 23.

Utara secara politis pulih.¹⁴⁹ Kedudukan Masyumi sebagai badan perjuangan politik umat Islam begitu terasa selama kurun waktu empat tahun, terhitung sejak 1945 sampai dengan 1949. Deliar Noer menerangkan bahwa pada kurun waktu tersebut, susunan kepengurusan Masyumi sangat merefleksikan delegasi-delegasi organisasi-organisasi Islam yang telah berdiri sejak masa penjajahan.¹⁵⁰

Salah satu organisasi Islam yang kehadirannya cukup signifikan pada masa awal pembentukan Masyumi adalah NU. Organisasi sosial keagamaan tersebut memiliki jumlah pengikut terbesar dan berkembang sangat baik selama era Pendudukan Jepang. Sejumlah tokoh NU bersama dengan Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam dipercaya oleh Pemerintah Militer Jepang untuk memimpin Masyumi yang ditujukan sebagai badan federasi umat Islam di Indonesia, menggantikan badan federasi MIAI. NU yang memiliki rekam jejak luar biasa selama era Pendudukan Jepang, dalam perkembangan berikutnya, turut serta dalam menentukan arah gerak umat Islam pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Separuh Pengurus Besar Masyumi pada masa awal pembentukannya, diisi oleh tokoh-tokoh NU.

Tabel 3.1. Daftar Pengurus Besar Masyumi dari NU Tahun 1945

Daftar Pengurus Besar Masyumi dari NU 1945	
Nama	Jabatan
K.H. Hasyim Asy'ari	Ketua Umum Majelis Syura
K.H. Abdul Wahab Chasbullah	Anggota Majelis Syura
K.H. Abdul Wahid Hasyim	Ketua Muda II Majelis Syura
K.H. Masykur	Bagian Hizbullah dan Sabilillah
K.H. M. Dahlan	Anggota Pimpinan
K.H. Fathurrachman Kafrawi	Anggota Pimpinan

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁵⁰ Noer, 1987, *op cit*, hlm. 99.

Data pada tabel sebelumnya menunjukkan keberadaan tokoh-tokoh NU dalam susunan awal Pengurus Besar Masyumi. Dari 37 orang yang ditunjuk untuk menjadi pengurus besar partai, terdapat enam orang yang berasal dari NU. Empat orang teratas dalam tabel tersebut merupakan tokoh-tokoh NU yang namanya telah populer pada masa penjajahan. K.H. Hasyim Asy'ari dan K.H. Wahab Chasbullah merupakan *founding fathers* NU, sementara, K.H. Wahid Hasyim¹⁵¹ populer sebagai pimpinan muda NU yang juga adalah putra K.H. Hasyim Asy'ari. Ia pernah menjadi Ketua Harian Masyumi pada era Pendudukan Jepang mendampingi ayahnya yang didaulat sebagai Ketua Majelis Syura Masyumi. K.H. Masykur yang terkenal sebagai pimpinan Laskar Hizbullah pada era Pendudukan Jepang juga masuk ke dalam jajaran Pengurus Besar Masyumi.¹⁵²

K.H. M. Dahlan dan K.H. Fathurrachman dikenal sebagai tokoh-tokoh teras NU. Kedua tokoh ini semakin populer setelah Indonesia merdeka. K.H. Dahlan pernah didaulat menjadi Ketua PBNU pada 1950-an, kemudian menjabat sebagai Menteri Agama pada masa Orde Baru. K.H. Fathurrachman, pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Sjahrir III. Orang-orang NU lainnya yang terlibat dalam susunan pimpinan maupun pengurus partai

¹⁵¹ K.H. Abdul Wahid Hasyim akrab disapa dengan K.H. Wahid Hasyim. Ia dilahirkan di Tebuireng, Jombang pada 1 Juni 1914 dari pasangan K.H. Hasyim Asy'ari dan Siti Nafiqah. K.H. Wahid Hasyim menjadi wakil golongan Islam yang berpartisipasi dalam BPUPKI. Ia juga pernah dipercaya menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Sjahrir III serta Menteri Agama pada Kabinet Natsir dan Kabinet Soekiman. Lihat dalam Aboebakar, *op cit*, hlm. 198.

¹⁵² K.H. Masykur dilahirkan pada 1900 atau bertepatan dengan 1315 hijriyah. Ia merupakan putra dan anak tertua dari pasangan K.H. Maksud dan Nyai Maemunah. K.H. Masykur sudah pergi ke Tanah Suci pada usianya masih anak-anak, di samping itu ia juga menimba ilmu dari sejumlah pondok pesantren di Jawa seperti Pesantren Bungkuk Singasari, Pesantren Sono, Sidoarjo, Pesantren Siwalan, di daerah yang sama, serta Pesantren Tebuireng di Jombang. K.H. Masykur termasuk ke dalam kader-kader NU yang aktif, ia pernah aktif menjadi di Laskar Hizbullah dan bersama K.H. Wahid Hasyim pernah menjadi anggota BPUPKI. Ada pun, pasca kemerdekaan, K.H. Masykur berkali-kali dipercaya menjadi Menteri Agama. Selengkapnya lihat dalam Soebagijo I.N., *K.H. Masykur Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung, 1982.

kemungkinan besar tersebar sampai tingkat cabang, anak cabang, maupun ranting. Hal demikian sangat mungkin terjadi karena warga Nahdliyin, jumlahnya relatif banyak, terutama di Pulau Jawa dan Madura. Salah satu tokoh NU yang tercatat pernah menjadi pimpinan Masyumi di daerah adalah K.H. Saifuddin Zuhri.¹⁵³

Data yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan bahwa kader-kader NU menempati beberapa jabatan yang sangat strategis dalam susunan awal Pengurus Besar Masyumi. Terdapat tiga orang kader NU yang dipercaya untuk menduduki posisi Majelis Syura, satu orang kader NU dipercaya untuk menjadi pimpinan bagian Hizbullah dan Sabilillah, dan dua orang kader NU dipercaya untuk menjadi anggota pengurus partai. Tiga orang NU yang ditunjuk menjadi bagian dari Majelis Syura, dua di antaranya diamanahi menjadi Pimpinan Majelis Syura yakni K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Umum dan K.H. Wahid Hasyim sebagai Ketua Muda II, sedangkan, K.H. Wahab Chasbullah dipercaya menjadi anggota Majelis Syura. Tidak ditemukan alasan khusus mengenai alasan dipilihnya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahid Hasyim, dan K.H. Wahab Chasbullah sebagai bagian dari Majelis Syura Masyumi, akan tetapi, hal tersebut dapat dipahami bahwa ketiga kader NU tersebut merupakan figur-figur yang memiliki pemahaman ilmu agama yang sangat memadai, terlebih lagi, ketiganya merupakan lulusan pondok pesantren sekaligus pimpinan NU yang karismatik dan sangat dihormati.

K.H. Masykur menjadi kader NU di Pengurus Besar Masyumi yang dipercaya untuk mengurus Laskar Hizbullah dan Sabilillah. K.H. Masykur

¹⁵³ K.H. Saifuddin Zuhri pernah mengaku kepada H.M. Rasjidi sebagai Ketua Partai Masyumi Karesidenan Kedu. Saifuddin Zuhri, *op cit*, hlm. 369.

didaulat menjadi Panglima Sabilillah pasca kemerdekaan. Hal demikian dapat dipahami bahwa selama era Pendudukan Jepang, K.H. Masykur telah aktif di Laskar Hizbullah. Reputasinya yang sangat baik di dalam laskar tersebut kemungkinan besar menjadi hal yang membuat K.H. Masykur dipercaya untuk mengurus bagian tersebut. K.H. Dahlan dan K.H. Fathurracman, keduanya merupakan kader-kader NU yang pada masa sebelum kemerdekaan sudah begitu aktif mencurahkan tenaganya di NU, sehingga mereka dipercaya untuk menjadi anggota Pengurus Besar Masyumi.

Hubungan Masyumi dengan organisasi-organisasi Islam, khususnya dengan NU berlangsung cukup baik pada masa awal pembentukannya. Hubungan antara Masyumi dengan kader-kader NU nampak begitu solid, terutama selama 1945-1949. Relasi yang terjalin antara Masyumi dengan NU pada era tersebut membuat batasan-batasan individu sebagai anggota partai dengan individu selaku anggota NU menjadi nampak sulit untuk dipisahkan. Para pemuka NU menganjurkan agar warganya berbondong-bondong bergabung dengan Masyumi dalam pelaksanaan Mukhtamar NU di Purwokerto pada 1946, sehingga pada waktu itu NU benar-benar menjadi tulang punggung Masyumi.¹⁵⁴

Sejumlah kader NU di Pengurus Besar Masyumi turut mencurahkan gagasan dan tenaganya untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia maupun berpartisipasi secara langsung dalam kabinet yang dipimpin oleh beberapa Perdana Menteri Republik Indonesia. Keaktifan kader-kader NU tersebut terjadi baik di dalam Majelis Syura maupun Pengurus Besar Masyumi.

¹⁵⁴ K.H.. Dahlan, *loc cit*, hlm. 37.

Kontribusi penting NU nampak ketika kader-kader mereka dalam Pengurus Besar Masyumi kompak menyatakan sikap terhadap Pemerintah Indonesia. Sejumlah kebijakan Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan Perdana Menteri Amir Sjarifuddin disikapi secara negatif oleh Masyumi. Perjanjian Linggarjati yang menjadi manifestasi taktik perjuangan Sutan Sjahrir ditolak oleh Masyumi. Perjanjian tersebut ditolak oleh Masyumi, baik oleh Pengurus Besar Masyumi beserta anggota-anggota istimewanya yaitu NU, Muhammadiyah, dan PUI. Sikap yang ditujukan Masyumi kepada Pemerintahan Sjahrir tersebut sejalan dengan sikap NU di Tebuireng, Jawa Timur, pada 18 Desember 1946.¹⁵⁵ Masyumi juga khususnya Majelis Syura yang menjadi wadah NU untuk memaksimalkan peran politiknya memberikan sikap serupa terhadap Perjanjian Renville yang dilakukan oleh Perdana Menteri Amir Sjarifuddin.¹⁵⁶ Masyumi menilai bahwa kedua perjanjian tersebut merugikan perjuangan yang sedang dilakukan oleh Indonesia.

Kontribusi penting lainnya dari kader NU tidak hanya sekadar dalam memberikan sikap atau pertimbangan lainnya dalam Majelis Syura. Kader-kader NU yang aktif di Masyumi juga dilibatkan menjadi menteri-menteri dalam beberapa kabinet pada kurun waktu 1945-1949. Pada bagian selanjutnya telah diuraikan data orang-orang Masyumi yang menjadi menteri pada masa kritis tersebut berikut dengan afiliasi organisasi Islam mereka.

¹⁵⁵ Noer, *op cit*, hlm. 165.

¹⁵⁶ *Ibid*, hlm. 62.

Tabel 3.2. Daftar Kader Masyumi yang Menjadi Menteri 1945-1949

Kabinet	Nama	Jabatan	Afiliasi Organisasi Islam
Sjahrir I	H.M. Rasjidi	Menteri Negara	Muhammadiyah
Sjahrir II	Arudji Kartawinata	Menteri Muda Pertahanan	PSII
	Moh. Natsir	Menteri Penerangan	Persis
	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Menteri Muda Keuangan	-
	H.M. Rasjidi	Menteri Agama	Muhammadiyah
Sjahrir III	Mr. Moh. Roem	Menteri Dalam Negeri	Muhammadiyah
	Harsono Tjokroaminoto	Menteri Muda Pertahanan	PSII
	Moh. Natsir	Menteri Penerangan	Persis
	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Menteri Keuangan	-
	Mr. Jusuf Wibisono	Menteri Muda Keuangan	Muhammadiyah
	K.H. Fathurrachman	Menteri Agama	NU
	K.H. A. Wahid Hasyim	Menteri Negara	NU
Amir Sjarifuddin II	Mr. Sjamsoeddin	Wakil Perdana Menteri I	Persatuan Umat Islam
	Mr. Moh. Roem	Menteri Dalam Negeri	Muhammadiyah
	Mr. Kasman Singodimedjo	Menteri Kehakiman	Muhammadiyah
	K.H. Masykur	Menteri Agama	NU
Hatta I	dr. Soekiman Wirjosandjojo	Menteri Dalam Negeri	Muhammadiyah
	Moh. Natsir	Menteri Penerangan	Persis
	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Menteri Kemakmuran	-
	K.H. Masykur	Menteri Agama	NU
Hatta II	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Wakil Perdana Menteri	-
	Mr. Sjamsoeddin	Menteri Penerangan	Persatuan Umat Islam

	K.H. Masykur	Menteri Agama	NU
	dr. Soekiman Wirjosandjojo	Menteri Negara	Muhammadiyah
Susanto Tirtoprodjo	Mr. Sjamsoedin	Menteri Penerangan	Persatuan Umat Islam
	K.H. Masykur	Menteri Agama	NU
RIS	Mr. Sjafruddin Prawiranegara	Menteri Keuangan	-
	K.H. A. Wahid Hasyim	Menteri Agama	NU
	dr. Abu Hanifah	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	-
	Mr. Moh. Roem	Menteri Negara	Muhammadiyah

Data dalam tabel di atas menunjukkan kader-kader Masyumi yang menjadi menteri selama kurun waktu 1945-1949. Terdapat 14 orang kader Masyumi yang duduk sebagai menteri pada masa tersebut. Dari jumlah kader sebanyak itu, terdapat beberapa menteri Masyumi yang menjadi kader organisasi Islam anggota istimewa Masyumi. Mereka adalah H.M Rasjidi, K.H. Fathurrachman, K.H. Masykur, K.H. Wahid Hasyim, Soekiman, Natsir, Roem, Jusuf Wibisono, Sjamsoeddin, Arudji Kartawaniata, Harsono Tjokroaminoto, dan Kasman Singodimedjo.

H.M. Rasjidi, Soekiman, Roem, Jusuf Wibisono, dan Kasman Singodimedjo merupakan kader Muhammadiyah. K.H. Fathurrachman, K.H. Masykur, dan K.H. Wahid Hasyim merupakan kader NU. Natsir dari Persis dan Sjamsoeddin dari PUI, sedangkan, Arudji Kartawinata dan Harsono Tjokroaminoto dari PSII. Perlu diketahui bahwa pada kurun waktu tersebut, umumnya orang-orang itu cenderung lebih aktif di Masyumi dibanding menjadi bagian dari organisasi-organisasi Islam. Soekiman, Roem, dan Jusuf Wibisono, cenderung lebih banyak beraktivitas sebagai aktivis Masyumi dibanding aktif

sebagai kader Muhammadiyah, begitu pula dengan Natsir dan Sjamsoeddin yang cenderung lebih aktif menjadi aktivis Masyumi dibanding menjadi kader organisasi Islam tempat mereka berkiprah pada masa sebelumnya. Para aktivis Masyumi yang benar-benar mewakili organisasi Islam hanya H.M. Rasjidi, Kasman Singodimedjo, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Fathurrachman, dan K.H. Masykur.

Menteri-menteri Masyumi dari NU pada kurun waktu 1945-1949 masih terbilang sedikit. Pola persebaran mereka dalam kabinet terbatas pada jabatan Menteri Agama saja, di antara 3 orang yang menjadi menteri, hanya 1 orang yang pernah dipercaya menjadi Menteri Negara. Hal demikian terjadi berhubung latar belakang kader NU yang belum beragam. Seluruh latar belakang kader NU yang menjadi menteri pada kurun waktu 1945-1949 merupakan lulusan pondok pesantren. Hal itu dapat terjadi karena perhatian NU sebelum masa kemerdekaan masih berfokus pada upaya pengembangan pendidikan pesantren. NU baru dapat menghasilkan generasi lulusan pesantren sampai pada masa awal kemerdekaan.¹⁵⁷ Lulusan-lulusan terbaik dari generasi pesantren sebelum era kemerdekaan tersebut di antaranya adalah K.H. Wahid Hasyim, K.H. Fathurrachman Kafrawi, K.H. Dahlan, dan K.H. Masykur. Fakta sosial di lapangan juga nampaknya menjadi pertimbangan dipilihnya kader-kader NU untuk mengisi jabatan Menteri Agama. Umat Islam tradisonal bagaimana pun juga adalah kelompok masyarakat yang besar, khususnya di Pulau Jawa, oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila kader-kader NU dipandang pantas untuk menduduki posisi Menteri Agama.

¹⁵⁷ Sampai pada 1950-an, nyaris tidak ada kader NU lulusan sekolah Belanda. Bahkan, hanya terdapat dua orang saja yang cakap berbahasa Inggris yaitu K.H. Wahid Hasyim dan K.H. Idham Chalid. Lihat dalam Greg Fealy, *op cit*, hlm. 135-136.

3.2. Hubungan Partai Masyumi dengan NU 1949-1952

Hubungan Masyumi dengan NU mulai menunjukkan gejala pasang surut pada 1949. Hal tersebut terjadi pasca pelaksanaan Mukhtamar Masyumi ke-IV di Yogyakarta pada 15-19 Desember 1949. Mukhtamar tersebut menjadi tonggak perubahan internal partai yang berimplikasi pada hubungan Masyumi dengan NU. Berbagai penulis sering menyatakan mukhtamar ini sebagai tonggak yang menyebabkan kerenggangan hubungan Masyumi dengan NU.

3.2.1. Status Majelis Syura

NU mulai merasa kedudukan mereka tersisihkan dalam internal Masyumi setelah status Majelis Syura diubah. Majelis Syura merupakan salah satu badan dalam struktur kepengurusan Masyumi yang diisi oleh para ulama. Majelis Syura pada awalnya memiliki nama lain "Dewan Partai" dan tidak hanya diisi oleh para ulama, melainkan juga para pemuka Islam.¹⁵⁸ Struktur awal pimpinan Majelis Syura terdiri atas empat orang ketua yaitu Ketua Umum, Ketua Muda I, Ketua Muda II, dan Ketua Muda III.¹⁵⁹

K.H. Hasyim Asy'ari, seorang ulama karismatik dari NU tercatat menjadi Ketua Umum Majelis Syura Masyumi yang pertama. Ia menjalankan tugas ini secara pasif dan lebih banyak melakukan aktivitas dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur. Kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi Majelis Syura didampingi oleh K.H. Wahid Hasyim yang tiada lain adalah putranya serta dua orang tokoh Muhammadiyah terkemuka yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman

¹⁵⁸ PB. Masjoemi, *loc cit*, hlm.3

¹⁵⁹ *Ibid.*

Singodimedjo.¹⁶⁰ Posisi Ketua Umum Majelis Syura Masyumi berubah seiring dengan wafatnya K.H. Hasyim Asy'ari pada 25 Juli 1947. Wafatnya ulama NU yang karismatik tersebut membuat posisi pimpinan tertinggi Majelis Syura digantikan oleh K.H. Wahab Chasbullah.

Majelis Syura nampak cukup berkontribusi pada kurun waktu 1945-1949. Majelis Syura selaku badan partai yang diisi oleh para ulama, cukup aktif memberikan nasihat dan fatwa atas berbagai kebijakan partai pada kurun waktu tersebut. Sikap resmi partai yang menolak Perjanjian Renville pada 1947 diilhami dari fatwa monumental yang berasal dari *ijtihad* Majelis Syura. Menurut para ulama yang aktif dalam badan tersebut, Perjanjian Renville membawa kerusakan terhadap keutuhan bangsa dan negara, oleh karena itu pimpinan partai wajib untuk menolak perjanjian tersebut.¹⁶¹ Dukungan resmi partai terhadap Kabinet Hatta yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjanjian Renville diputuskan setelah K.H. Wahab Chasbullah, selaku ulama NU yang menjadi Ketua Majelis Syura Masyumi berdebat dengan K.H. R. Hadjid dari Muhammadiyah,¹⁶² setelah melewati perdebatan tersebut, Majelis Syura akhirnya membolehkan kader-kader Masyumi untuk bergabung dengan kabinet tersebut. Majelis Syura di samping mengeluarkan fatwa mengenai Perjanjian Renville pada 1947, memberikan pula

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 140; Mr. Jusuf Wibisono membeberkan perbedaan paham antara para ulama dengan para aktivis partai dalam memandang perjanjian Renville. Pernyataan itu dicatat harian *Berita Indonesia* sebagai berikut, “djalan pikiran keagamaan tidak sesuai dengan struktur pikiran politik. Karena ini tidak djarang terdjadi, bahwa kaum alim-ulama itu telah mengambil keputusan2 jg bertentangan dalam lapangan politik. Sebagai tjontoh disebutnja persetudjuan Renville”. Selengkapnja lihat dalam *Berita Indonesia*, 26 April 1952, hlm. 2

¹⁶² Lihat dalam Saifuddin Zuhri, *op cit*, hlm. 455-456.

fatwa mengenai keterlibatan prajurit perempuan Islam yang berjuang di medan perang pada 1945.¹⁶³

NU merasa peran Majelis Syura begitu aktif pada kurun waktu 1945-1949. NU melihat pimpinan Masyumi mampu bekerjasama secara baik dengan kalangan ulama khususnya ulama NU yang juga menjadi pimpinan tertinggi Majelis Syura. Kedudukan ulama sangat berpengaruh selama perjuangan mengangkat senjata berlangsung, status ulama yang berwenang untuk memberikan fatwa mengenai *Jihad fi sabilillah* atau perang sabil dapat menggerakkan emosi rakyat dalam medan peperangan. Hubungan antara pimpinan partai dengan para ulama mengalami perubahan setelah perjuangan mengangkat bersenjata berakhir, seiring dengan diakuinya kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949.

NU merasa mulai sejak itu status Majelis Syura selaku wadah berhimpun bagi para ulama dibatasi. NU menganggap Majelis Syura sebagai badan legislatif partai yang dapat bekerja beriringan dengan pimpinan partai. K.H. Dahlan, H. Aboebakar Atjeh, dan Greg Fealy meyakini bahwa perubahan atas status Majelis Syura tersebut terjadi dalam pelaksanaan Mukhtamar Masyumi ke-IV dan sering dikaitkankan sebagai penyebab keluarnya NU dari Masyumi.¹⁶⁴ Penulis berpendapat bahwa pernyataan-pernyataan para penulis umumnya tentang status Majelis Syura Masyumi tidak didukung oleh bukti-bukti yang dapat

¹⁶³ Yusril Ihza Mahendra, *ibid*, hlm. 139.

¹⁶⁴ K.H. Dahlan, salah seorang tokoh NU menyatakan bahwa, “Akan tetapi berhubung dengan Masjumi sedjak kongresnja di Jogjakarta pada achir tahun 1949 itu dirubah demikian rupa, dimana Madjlis Sjuro jg merupakan tempat penting bagi para ‘Ulama dan pemimpin2 Islam mendjadi anggotanja sudah tidak lagi didjadikankan sebagai badan legislatief disamping DPP. melainkan hanja didjadi Badan Penasihat sadja. Lihat dalam, *Riwajat Singkat Nahdlatul Ulama*, majalah *Gema Muslimin*, *loc cit*, hlm. 37; hal senada dinyatakan oleh Aboebakar, lihat dalam H.Aboebakar, *op cit*, hlm. 545; hal tersebut juga dinyatakan oleh Greg Fealy peneliti NU, lihat dalam Greg Fealy, *op cit*, hlm. 97.

dipertanggungjawabkan karena sebenarnya tugas dan wewenang Majelis Syura yang tercatat dalam draf AD dan ART Masyumi 1945, 1949, 1952, secara substansial adalah memberikan nasihat dan pertimbangan pada pimpinan partai.¹⁶⁵ Majelis Syura sejak awal pembentukan Masyumi bukan dijadikan sebagai badan legislatif yang berwenang memberikan fungsi-fungsi legislasi.

Status Majelis Syura Masyumi sebagai badan penasihat telah tercatat di dalam AD Masyumi 1945. Hal itu terlihat dalam redaksi AD Masyumi 1945 pasal II yang berbunyi, “Majelis Syura adalah badan penasihat dan pemberi fatwa pada Pimpinan Partai dalam pekerjaan secara garis besar.”¹⁶⁶ Pernyataan mengenai peran Majelis Syura yang dibatasi sejak pelaksanaan Mukhtamar Masyumi ke-IV dengan demikian patut ditinjau kembali. Alih-alih membatasi peran Majelis Syura, ART Masyumi yang diputuskan pada 1949 justru memberikan keleluasaan yang cukup besar kepada Majelis Syura dalam menjalankan peran politiknya. Hal demikian dapat dilihat tugas dan wewenang Majelis Syura dalam ART Masyumi 1949, pasal V tentang Majelis Syura, yang telah diuraikan di bawah ini:

1. Badan Pekerdja berhak mengusulkan hal-hal jang mengenai politik dan ketentaraan kepada P.B Partai dan berhak menerima djawaban.
2. Badan Pekerdja wadjib memberi pertimbangan atas pertanjaan-pertanjaan jang dikemukakan oleh P.B. Partai.
3. P.B. Partai wadjib meminta pertimbangan Badan Pekerdja dalam hal politik dan ketentaraan, jang menyinggung sjariat Islam.
4. Hak dan kewadjiban Badan Pekerdja jang tersebut diatas mendjadi pula hak dan kewadjiban Madjlis Sjuro Pusat waktu ada sidangnja.
5. Madjlis Sjuro Pusat menerima tanggung-jawab atas pekerdjaan „Badan Pekerdja”.
6. Keputusan jang diambil dengan suara bulat oleh Madjlis Sjuro Pusat mengenai sjareat Islam adalah keputusan jang tertinggi.¹⁶⁷

¹⁶⁵ Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 123.

¹⁶⁶ Redaksi AD Masyumi 1945 tentang Majelis Syura ini dikutip dari Yusril Ihza Mahendra, *loc cit*, hlm 123.

¹⁶⁷ Sekretariat Umum Masjumi, *op cit*, hlm. 8.

ART Masyumi yang diputuskan pada 1949 justru membuat status Majelis Syura berada pada posisi yang istimewa. Majelis Syura menjadi badan penasihat yang dilarang untuk dilewatkan pertimbangannya oleh pimpinan partai. Pimpinan partai wajib memohon pertimbangan kepada Majelis Syura dalam urusan politik dan militer yang berhubungan dengan syariat Islam. Hak dan kewajiban Majelis Syura mulai berubah bukan dalam pelaksanaan Mukhtar Masyumi ke-IV pada 1949, melainkan dalam Mukhtar Masyumi ke-V pada 1952. Hal itu nampak dalam ART Masyumi 1952 BAB IX tentang Majelis Syuro pasal 30 yang telah diuraikan di bawah ini:

1. Majelis Syura Pusat berhak mengusulkan hal-hal yang mengenai politik kepada Pimpinan Partai.
2. Majelis Syura Pusat memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang soal-soal yang bertalian dengan pasal II, III, IV Anggaran Dasar dan lain-lain, yang dikemukakan oleh Pimpinan Partai.
3. Dalam soal politik yang mengenai hukum agama, maka Pimpinan Partai meminta fatwa, dan Majelis Syura Pusat memberikan jawabannya dalam waktu yang dikehendaki.
4. Putusan Majelis Syura Pusat mengenai hukum agama, adalah keputusan yang mengikat Pimpinan Partai.
5. Jika Mukhtar/Dewan Partai berpendapat lain daripada putusan yang diambil oleh Majelis Syura Pusat dan hasil perundingan mereka itu merupakan putusan tertinggi.¹⁶⁸

Rumusan mengenai hak dan kewajiban Majelis Syura yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya menerangkan bahwa pada dasarnya Majelis Syura tidak pernah menjadi badan legislatif partai yang menjalankan fungsi-fungsi legislasi. Ketiga rumusan yang telah dijabarkan pada intinya menyatakan bahwa Majelis Syura merupakan badan penasihat atau pertimbangan partai. Status Majelis Syura mulai berubah setelah pelaksanaan Mukhtar Masyumi ke-V yang

¹⁶⁸ Yayasan Pembangunan Umat, *op cit*, hlm. 46.

diselenggarakan pada Juli 1952, artinya NU telah lebih dahulu keluar dari Masyumi sebelum status Majelis Syura diubah. Rumusan mengenai hak dan kewajiban Majelis Syura dalam ART Masyumi 1952 tidak menyantumkan lagi redaksi yang mewajibkan pimpinan partai untuk meminta pertimbangan kepada Majelis Syura.

3.2.2. Dominasi Elite Muda

Muktamar Masyumi ke-IV menjadi tonggak peralihan kepemimpinan partai dari angkatan tua pada angkatan yang lebih muda. Anwar Harjono, Juru Bicara Masyumi, menyatakan bahwa sebelum pelaksanaan Muktamar Masyumi ke-IV, telah muncul gagasan di antara tokoh Masyumi supaya ketua partai diserahkan pada sosok yang lebih muda.¹⁶⁹ Anwar Harjono menyatakan, hal itu disebabkan karena tantangan Masyumi pada masa berikutnya memerlukan kepemimpinan yang lebih gesit, terampil, dan enerjik.¹⁷⁰ Soekiman yang saat itu sudah berusia 51 tahun dipandang sudah tua dan sulit untuk melakukan mobilisasi dengan intensitas yang tinggi. Hal tersebut terlihat ketika Soekiman menunjukkan sikapnya yang tidak bersedia pindah dari Yogyakarta ke Jakarta, padahal sebelumnya telah disepakati bahwa apabila kedaulatan Indonesia sudah diakui dan ibukota Indonesia kembali ke Jakarta, maka kedudukan Pengurus Besar Masyumi akan turut pindah ke Jakarta.¹⁷¹

Rekam jejak kepemimpinan Soekiman juga menjadi alasan munculnya keinginan kuat dari internal Masyumi untuk menggantikannya. Ia mendapatkan

¹⁶⁹ Lukman Hakiem, *Biografi Mohammad Natsir*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019, hlm. 210.

¹⁷⁰ *Ibid.*

¹⁷¹ *Ibid.*

kritik yang cukup keras dari internal partai. Soekiman dikritik karena kembali ke Yogyakarta ketika dipercaya menjadi Menteri Dalam Negeri PDRI, sehingga akhirnya ia ditangkap Belanda.¹⁷² Soekiman dikecam karena menyetujui Roem untuk memimpin perundingan dengan Belanda pada 1949, padahal ia tidak berhak melakukan itu.¹⁷³ Soekiman juga dikecam karena tidak mampu memersatukan umat Islam, yang ditandai dengan keluarnya sebagian aktivis PSII pada 1947.¹⁷⁴

Peserta Muktamar Masyumi ke-IV mengusulkan beberapa orang kader yang berusia lebih muda untuk menjadi calon pimpinan partai yang baru. Beberapa orang yang diusulkan antara lain adalah Natsir, Sjafruddin, Roem, dan K.H. Wahid Hasyim, ditambah dengan Soekiman selaku petahana. Hasil pemungutan suara untuk pemilihan pimpinan partai yang baru memutuskan Natsir menjadi Ketua Umum Masyumi. Ia mengalahkan Soekiman dengan perolehan suara 132:76, sementara calon yang lain masing-masing meraih 10 suara.¹⁷⁵ Para pendukung Soekiman seperti Mr. Jusuf Wibisono, Mr. Sjamsoeddin, dr. Abu Hanifah, dan Roeslan Wongsokusumo mengusulkan agar Soekiman dijadikan figur sentral untuk memersatukan umat.¹⁷⁶

Natsir mengakomodasi aspirasi tersebut dengan menjadikan Soekiman sebagai Presiden Masyumi. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Natsir menghargai kedudukan dan kiprah Soekiman dalam Masyumi. Natsir, Soekiman, dan Sjamsoeddin kemudian diberi amanah menjadi formatur partai. Hasil usaha ketiga formatur tersebut dapat dilihat melalui uraian di bawah ini:

¹⁷² Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 128.

¹⁷³ *Ibid*, hlm 129.

¹⁷⁴ *Ibid*.

¹⁷⁵ *Ibid*, hlm. 130.

¹⁷⁶ *Ibid*, hlm. 211.

Presiden	: dr. Soekiman Wirjosandjojo
Ketua Umum	: Mohammad Natsir
Anggota	: K.H. A. Wahid Hasyim
	: Mr. Mohamad Roem
	: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
	: dr. Abu Hanifah
	: Mr. Jusuf Wibisono
	: Zainul Arifin
	: Zainal Abidin Ahmad
	: Ki Bagus Hadikusumo
	: H. Benjamin
	: Abdurrahman Syihab
	: Ny. Sunarjo Mangunpuspito
	: dr. Sjamsoeddin ¹⁷⁷

Struktur kepengurusan pusat Masyumi yang telah diuraikan di atas, mencerminkan perubahan komposisi sumber daya manusia di internal partai tersebut.¹⁷⁸ Sebagian besar pengurus yang pernah terlibat dalam susunan Pengurus Besar Masyumi pada 1945, tidak ikut ambil bagian lagi dalam kepengurusan yang dibentuk pada 1949. Jumlah wakil NU maupun Muhammadiyah nampak berkurang cukup signifikan. Pengurus yang secara legal-formal mewakili Muhammadiyah hanya Ki Bagus Hadikusumo, sedangkan yang mewakili NU hanya 2 orang saja yaitu K.H. Wahid Hasyim dan Zainul Arifin. Struktur kepengurusan hasil Muktamar Masyumi ke-IV lebih mencerminkan organisasi yang diisi oleh elite muda profesional, dibanding sebagai organisasi pemersatu keberadaan organisasi-organisasi Islam. Elite muda tersebut pada umumnya memiliki latar belakang lulusan sekolah Belanda. Kemunculan elite muda dalam struktur kepengurusan pusat Masyumi itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan hubungan Masyumi dengan NU menjadi kurang harmonis.

¹⁷⁷ Deliar Noer, *op cit*, hlm. 101.

¹⁷⁸ Istilah Pengurus Besar mulai diubah menjadi Dewan Pimpinan Partai (DPP) memasuki 1950-an.

Struktur kepengurusan pusat hasil Muktamar Masyumi ke-IV didominasi oleh elite lulusan sekolah Belanda. Elite Masyumi lulusan sekolah Belanda dalam susunan kepengurusan tersebut terdiri atas 7 orang. Mereka itu adalah Natsir¹⁷⁹ (1908-1993), Soekiman (1898-1971), Sjafruddin (1911-1889), Roem (1908-1983), Abu Hanifah (1908-1981), Jusuf Wibisono (1912-1982), dan Sjamsoeddin (1886-1950), di samping itu, pada umumnya mereka adalah elite kelahiran awal abad ke-20 yang berusia relatif muda, hanya Soekiman dan Sjamsoeddin saja yang dilahirkan pada akhir abad ke-19. Jumlah elite lulusan sekolah Belanda itu lebih banyak dibanding dengan jumlah elite lulusan sekolah agama atau pesantren yang hanya terdiri atas 5 orang saja. Mereka itu adalah K.H. Wahid Hasyim,¹⁸⁰ Zainul Arifin, Ki Bagus Hadikusumo, Abdurrahman Syihab, dan Haji Benjamin.

Elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda mulai tampil memimpin Masyumi menggantikan tokoh-tokoh tua sejak Muktamar Masyumi ke-IV. Kelompok yang termasuk pada tokoh-tokoh tua itu dilahirkan pada akhir abad ke-19. Sebagian dari tokoh tua tersebut pernah memiliki posisi penting dalam menghadapi Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang. Beberapa tokoh tua Masyumi itu antara lain adalah Soekiman (1898-1974), Abikusno Tjokrosujoso (1897-1968), Sjamsoeddin (1886-1950), Haji Agus Salim (1884-1954), K.H. Wahab Chasbullah (1888-1971), dan Ki Bagus Hadikusumo (1890-1954). Tokoh-tokoh tua tersebut menjadi guru bagi elite muda Masyumi karena mereka dipandang memiliki pengalaman lebih banyak dalam menghadapi penjajah.

¹⁷⁹ Potret wajah Natsir dapat dilihat dalam lampiran 6.

¹⁸⁰ Potret wajah K.H. Wahid Hasyim dapat dilihat dalam lampiran 7.

Elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda umumnya memiliki kualifikasi yang jarang sekali dijumpai pada masa itu. Mereka dipandang sebagai kalangan intelek, enerjik, mampu berbahasa Belanda, cakap mengelola urusan organisasi dan politik, serta memiliki kesadaran beragama yang tinggi. Citra kualifikasi kepribadian semacam itu terdapat pada elite Masyumi generasi Politik Etis yang dilahirkan pada awal ke-20 seperti Natsir (1908-1993), Roem (1908-1983), Sjafruddin (1911-1989), Burhanuddin (1917-1987), Jusuf Wibisono (1912-1982), Prawoto Mangkusasmito (1910-1970), Mohammad Sardjan (1905-1992), Abu Hanifah (1908-1981), dan Kasman Singodimedjo (1904-1982). Elite Masyumi lulusan sekolah Belanda pada umumnya dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur modern dari sekolah maupun pergaulan keseharian mereka. Nilai-nilai egaliter (persamaan derajat) yang mereka peroleh dari sekolah-sekolah Belanda terinternalisasi ke dalam alam pikiran elite muda Masyumi, sehingga hal itu cukup berdampak pada perilaku mereka dalam menjalankan organisasi.

Dominasi elite muda Masyumi terus berlanjut pada masa berikutnya. Natsir terpilih kembali menjadi Ketua Umum Masyumi dalam pelaksanaan Mukhtar Masyumi ke-V pada 1951, begitu pula dengan Soekiman yang tetap dipercaya menjadi Presiden Masyumi. Struktur Dewan Pusat Pimpinan (DPP) Masyumi pada 1951 seakan melengkapi kepengurusan pusat Masyumi pada 1949. Susunan DPP Masyumi hasil Mukhtar Masyumi ke-V dapat dilihat pada uraian berikut ini:

Presiden	: dr. Soekiman Wirjosandjojo
Wakil Ketua I Presiden	: Mr. Kasman Singodimedjo
Wakil Ketua II Presiden	: Mr. Jusuf Wibisono
Ketua	: M. Natsir

Wakil Ketua I	: Prawoto Mangkusasmito
Wakil Ketua II	: Mr. Mohamad Roem
Anggota	: Mr. Sjafruddin Prawiranegara
	: dr. Abu Hanifah
	: K.H. A. Wahid Hasyim
	: K.H. Masjkur
	: Ki Bagus Hadikusumo
	: K.H. Fakih Usman
	: Samsuridjal
	: Ny. Sunarjo Mangunpuspito
	: Anwar Harjono
Dewan Organisasi	
Ketua	: M. Natsir
Sekretaris Pimpinan Partai	: K. Taufiqurrahman

Struktur DPP Masyumi hasil Mukhtar Masyumi ke-V tersebut menunjukkan kembali dominasi elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda. 16 orang yang dipilih sebagai DPP Masyumi, 10 orang di antaranya adalah lulusan sekolah Belanda. Mereka yang termasuk pada kelompok tersebut adalah Soekiman, Natsir, Roem, Sjafruddin, Kasman Singodimedjo, Jusuf Wibisono, Prawoto Mangkusasmito, Abu Hanifah, Samsuridjal, dan Ny. Sunarjo Mangunpuspito. 9 orang di antara elite lulusan sekolah Belanda itu pada umumnya dilahirkan pada awal abad ke-20, hanya Soekiman saja yang dilahirkan pada akhir abad ke-19. Elite lulusan pesantren dalam DPP Masyumi hasil Mukhtar Masyumi ke-IV terdiri atas 6 orang, yaitu K.H. Wahid Hasyim, K.H. Masykur, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Fakih Usman, K.H. Taufiqurrahman, dan Anwar Harjono.

Perilaku elite muda Masyumi yang dipengaruhi kultur sekolah Belanda tanpa mereka sadari menyebabkan sebagian orang lulusan pesantren merasa tersisihkan. Egalitarianisme yang dianut oleh sejumlah elite muda Masyumi

lulusan sekolah Belanda belum sepenuhnya dapat diterima oleh sebagian lulusan pesantren, khususnya NU. Sikap semacam itu nampak setelah elite muda lulusan sekolah Belanda mendominasi kepengurusan pusat Masyumi.¹⁸¹ Elite NU menganggap elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda memanfaatkan pengaruh karisma ulama untuk mendukung berbagai kepentingan partai, sementara itu, para ulama tidak diberikan kewenangan politis yang sewajarnya. K.H. Wahab Chasbullah dalam akhir pidato Konferensi Dakwah NU di Magelang pada 29 September-1 Oktober 1951 mengungkapkan sebuah tamsil tentang hubungan ulama dengan elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda. Ia mengibaratkan hubungan itu seperti hubungan antara kusir dan kuda.¹⁸² K.H. Wahab Chasbullah menyatakan bahwa NU yang selama ini berperan seperti kuda sudah sepantasnya menolak model persatuan tersebut.

K.H. Wahid Hasyim dalam kegiatan yang sama juga menyinggung perilaku elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda. Ia terlebih dahulu menerangkan bahwa umat Islam saat itu memiliki dua model pimpinan yaitu pemimpin politik dan pemimpin agama atau ulama. K.H. Wahid Hasyim berpandangan bahwa pemimpin politik pada umumnya adalah orang-orang berpendidikan Barat, tidak begitu memahami agama Islam, sementara itu, para ulama adalah orang-orang yang dipastikan memiliki pemahaman yang luas mengenai ajaran Islam. Ia menguraikan cukup rinci ihwal kedudukan ulama di tengah masyarakat.

¹⁸¹ K.H. Idham Chalid menyatakan bahwa terdapat sebagian orang Masyumi lulusan sekolah Belanda yang terkesan tidak menghormati para ulama. Lihat dalam Deliar Noer, *op cit*, hlm. 87.

¹⁸² Saifuddin Zuhri, *op cit*, hlm. 498.

“Mereka ini mempunyai pengaruh amat besar dalam masyarakat dan mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Pemerintah Hindia Belanda dan Jepang tahu betul harga kedudukan ulama, oleh karena itu, dua kekuasaan itu menjadikan ulama sebagai alat untuk mempertahankan serta memperkokoh kedudukan mereka selaku penguasa. Bahkan, pemerintah Jepang memasukkan ulama sebagai alat strategis dalam mencapai kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya mereka melawan Sekutu. Para ulama menjadi senjata perang di samping beras, besi tua, minyak, dan amunisi”¹⁸³

K.H. Wahid Hasyim secara terang-terangan mengungkapkan kekesalannya pada sekelompok orang yang menisbatkan dirinya sebagai “pemimpin Islam” tetapi tidak menyadari kedudukan ulama di tengah masyarakat. Ia berpendapat bahwa NU telah banyak meminjamkan para ulamanya sebagai alat untuk kepentingan kelompok semacam itu.

“Kalau orang asing tahu benar harga para ulama meskipun salah penggunaannya, amat disesalkan bahwa bangsa sendiri, terutama golongan yang menamakan diriya ‘Pemimpin Islam’ tidak menyadari kedudukan ulama dalam masyarakat kecuali untuk diperalat dan dijadikan semacam kuda kepeng. Ulama dijadikan pijakan untuk mencapai kedudukan politik, popularitas, dan mencari pengaruh. Dan dalam hubungan ini, Nahdlatul Ulama telah banyak ‘meminjamkan’ para ulamanya untuk diperlakukan menjadi alat. Saya banyak mendapat laporan dari daerah-daerah, bahwa ulama harus mau dipimpin oleh orang-orang yang dangkal pengetahuan (agama)nya meskipun mempunyai merek ‘Pemimpin Islam’. Di sinilah tugas kewajiban para muballigh NU untuk mengembalikan wibawa ulama sebagai pemimpin umat dan *warotsatul anbiya*.”¹⁸⁴

Pengaruh egalitariansime terhadap kepribadian elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda terkadang meninggalkan kesan yang kurang baik bagi para ulama maupun orang-orang partai lulusan pesantren. K.H. Idham Chalid, salah seorang tokoh NU, menceritakan pengalamannya mengenai adab kurang

¹⁸³ *Ibid.*

¹⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 499.

elok sebagian elite muda Masyumi lulusan sekolah Belanda kepada seorang ulama besar NU.

“Seorang tamatan sekolah MULO menganggap seorang tamatan tsanawiyah itu lebih rendah daripada keluaran HIS. Ini tidak terderita oleh santri-santri model saya dan saudara. Belum ada waktu itu Drs., lantas mau duduk menghormat ulama begini. Semua waktu itu, juga [jangan?] lagi Drs., keluaran AMS saja bicara sambil bertolak pinggang, di muka K. Wahab, karena merasa lebih tinggi.”¹⁸⁵

Arogansi sebagian elite muda Masyumi nampak secara terang-terangan dalam pelaksanaan Mukhtar Masyumi ke-IV. Mr. Mohammad Saleh, salah seorang kader Masyumi yang saat itu menjadi Walikota Yogyakarta dalam pidatonya menyinggung para ulama. Ia menyampaikan bahwa urusan politik tidak bisa dibicarakan seraya menggunakan tasbih. Saleh juga menyatakan bahwa urusan politik jangkauannya lebih luas melebihi pondok pesantren.¹⁸⁶ Ucapan Saleh, sekali pun, tidak langsung ditujukan kepada ulama dan orang-orang NU, akan tetapi, wakil-wakil NU yang saat itu mendengarkan pidato Saleh merasa dan menafsirkan ucapan tersebut sebagai bentuk sindiran terhadap ulama-ulama mereka. Orang-orang NU yang hadir dalam kongres tersebut melakukan protes dan meminta agar ucapan Saleh ditarik kembali, akan tetapi ia menolaknya.

Arogansi sebagian elite muda Masyumi terjadi lagi pasca Mukhtar Masyumi ke-IV. Hal demikian terjadi ketika K.H. Wahid Hasyim sedang berpidato dalam forum rapat DPP Masyumi di Bogor pada 1952. Menurut Deliar Noer, berdasarkan catatan dari NU, saat itu tidak ada seorang hadirin pun yang mendengarkan pidato dari tokoh tekemuka NU tersebut. K.H. Idham Chalid yang

¹⁸⁵ Deliar Noer, *op cit*, hlm. 89

¹⁸⁶ *Ibid*, hlm. 88.

saat itu hadir sontak melakukan protes kepada Natsir selaku pimpinan rapat.¹⁸⁷ Ia meminta agar para hadirin menyimak pidato yang disampaikan oleh K.H. Wahid Hasyim.

Natsir yang terpilih menjadi Ketua Umum Masyumi dinilai memberikan kesan yang berbeda bagi sebagian pihak di internal partai. Ia merupakan salah seorang elite Masyumi yang termasuk ke dalam angkatan muda. Natsir terpilih menjadi pucuk pimpinan Masyumi saat usianya telah mencapai 41 tahun. Ia memiliki rekam jejak yang terbilang panjang dalam aktivitas keumatan. Natsir merupakan aktivis Jong Islamieten Bond (JIB)¹⁸⁸ dan anak didik Tuan A. Hassan,¹⁸⁹ seorang pemuka Persis sewaktu belajar di AMS Bandung. Murid Tuan A. Hassan tersebut pernah membina lembaga Pendidikan Islam (Pendis), sebuah lembaga pendidikan partikelir yang ditujukan untuk Kaum Muslimin yang tidak mampu bersekolah di lembaga pendidikan Belanda. Natsir juga terjun ke dalam dunia politik sebagai anggota Partai Syarikat Islam (PSI) dan Partai Islam Indonesia (PII) Bandung.

Karir Natsir semakin menjurus dalam bidang pendidikan dan politik pada era Pendudukan Jepang sampai menjelang kemerdekaan. Ia dipercaya Pemerintahan Militer Jepang untuk bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Kotamadya Bandung dan menjadi Sekretaris Sekolah Tinggi Islam (STI) yang

¹⁸⁷ *Ibid.*

¹⁸⁸ Jong Islamieten Bond atau populer dengan istilah JIB merupakan organisasi pemuda pelajar Islam di era Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Selengkapnya, lihat dalam Yudi Latif, *Inteligensia Muslim dan Kuasa*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 273.

¹⁸⁹ Natsir mengakui A. Hassan sebagai guru yang sangat memengaruhi dirinya. Ia dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pendekatan dan metode pendidikan agama A. Hassan berlainan dari pada umumnya. Natsir sering menjumpai A. Hassan ketika sedang bersekolah di Bandung. Lihat dalam A.W Praktiknya, *Pesan Perjuangan Seorang Bapak M. Natsir*. Jakarta: LAZNAS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia dan Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2019, hlm. 18-20.

dirintis oleh Prof. Abdul Kahar Muzakir dan Mohammad Hatta. Natsir didaulat sebagai anggota Badan Pekerja (BP) KNIP pasca Indonesia merdeka.¹⁹⁰ Karir Natsir dalam bidang politik semakin cemerlang manakala Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Natsir dipercaya menjadi Menteri Penerangan di bawah Kabinet Sjahrir II dan III . Kinerja Natsir yang baik selama menjadi Menteri Penerangan membuatnya dipercaya kembali menjadi menteri tersebut oleh Mohammad Hatta yang menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Amir Sjarifuddin.

Natsir merupakan elite Masyumi lulusan sekolah Belanda yang memahami Islam dengan baik. Ia menjadi cerminan perpaduan kaum intelektual didikan Belanda dengan kaum santri yang cukup mendalami agama Islam. Perpaduan dua aliran pemahaman itu terbukti mampu menarik mayoritas dukungan internal partai untuk menjadikannya sebagai pucuk pimpinan Masyumi. Natsir dinilai pantas untuk menjadi pemimpin partai Islam karena dengan bekal dua pemahaman itu, ia dipandang telah memenuhi kualifikasi sebagai pimpinan partai Islam yang ideal, yaitu sebagai pemimpin politik sekaligus pemimpin yang memahami Islam dengan baik.

Kualifikasi Natsir berbeda dengan Soekiman. Kualifikasi pribadi Natsir dianggap cukup layak apabila disejajarkan dengan para ulama,¹⁹¹ walaupun

¹⁹⁰ KNIP merupakan akronim dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Badan ini dibentuk sebagai penasehat dan pembantu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pasca kemerdekaan. Badan ini merupakan cikal bakal dari parlemen (DPR) hari ini. Selengkapnya lihat dalam George McTurnan Kahin, *op cit*, hlm. 173-174.

¹⁹¹ Deliar Noer, *loc cit*, hlm. 89.

sebenarnya Natsir sendiri tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai ulama.¹⁹² Soekiman memiliki pengalaman berpolitik, akan tetapi, ia tidak mendalami Islam secara intensif seperti Natsir, oleh karena itu, Soekiman terkesan sangat bergantung pada berbagai pertimbangan para ulama di Majelis Syura tatkala ia dipercaya memimpin Masyumi.¹⁹³ Kualifikasi kepribadian Natsir yang demikian itu kemungkinan besar dipandang oleh sebagian pihak berpotensi untuk mengurangi pengaruh ulama di dalam Masyumi.

Deliar Noer dan Remy Madinier menuding Natsir yang terpilih menjadi Ketua Umum Masyumi sebagai penyebab terganggunya harmonisasi hubungan Masyumi dengan NU.¹⁹⁴ Dua orang penulis itu menyatakan bahwa latar belakang Natsir sebagai aktivis Persis di bawah asuhan Tuan A. Hassan menjadi salah satu alasan terganggunya hubungan Masyumi dengan NU.¹⁹⁵ Persis merupakan organisasi Islam modern dan puritan dari Bandung. Persis cenderung keras menentang berbagai praktik peribadatan Islam yang dinilai menyimpang dari Al-

¹⁹² Natsir pernah menulis sebuah artikel mengenai peran para ulama berjudul, *Kedudukan Ulama-Ulama dalam Masyarakat*, tulisan tersebut diterbitkan di majalah *Pandji Islam* pada Juni 1939. Selengkapnya lihat dalam M. Natsir, *Capita Selecta Jilid I*. Jakarta: LAZIS Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, 2015, hlm. 187-193.

¹⁹³ Deliar Noer, *op cit*, hlm. 87; Natsir menyatakan bahwa ia pun seringkali bertukar pikiran dengan para pengurus Majelis Syura untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi partai. Natsir melihat hubungan antara pimpinan partai dengan Majelis Syura sebagai hubungan dua pihak yang sama-sama bertanggungjawab dalam menyelesaikan beragam masalah partai. Lihat dalam Yusril Ihza Mahendra, *op cit*, hlm. 139.

¹⁹⁴ Dua orang penulis itu tidak menyertakan sumber-sumber yang kredibel dalam menjelaskan pengaruh kepemimpinan Natsir terhadap NU di internal Masyumi. Pandangan Deliar Noer dan Remy Madinier tentang pengaruh Natsir dan kaitannya dengan NU dipertautkan dengan aspek pemahaman keagamaan Natsir yang berlainan dengan pemahaman agama orang-orang NU dan rekam jejak Natsir bersama dengan Tuan A. Hassan. Deliar Noer bahkan menyatakan, "Ada kalanya pada waktu sebelum perang itu ia (Natsir) turut serta mewakili organisasinya berdebat dengan pihak NU yang antara lain diwakili oleh Kiai Wahab, tokoh yang pada tahun 1952 menghendaki agar pos Menteri Agama diserahkan kepada NU". Pernyataan Deliar Noer ini tidak didukung oleh data-data yang telah penulis temukan, karena hingga penelitian skripsi ini selesai, penulis tidak menjumpai satu pun riwayat polemik antara Natsir dengan NU. Selengkapnya lihat dalam Deliar Noer, *ibid*, hlm. 89; Remy Madinier, *op cit*, hlm. 365.

¹⁹⁵ Remy Madinier bahkan secara terang-terangan menuding Natsir sebagai pemicu keluarnya NU dari Masyumi. Lihat Remy Madinier, *ibid*, hlm. 360.

Quran maupun As-Sunnah.¹⁹⁶ Salah satu tokoh terkemuka Persis adalah Tuan A. Hassan.¹⁹⁷ Ia terkenal karena tulisannya yang tajam dan pernah berpolemik dengan tokoh-tokoh Islam tradisional, nasionalis-sekuler, Ahmadiyah, Kristen, bahkan atheis.

Natsir aktif di Persis di bawah asuhan Tuan A. Hassan, meski demikian, ia tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap kepribadian muridnya itu. Murid Tuan A. Hassan ini tidak senang berpolemik dengan sesama umat Islam.¹⁹⁸ Ia bersikap lebih dinamis dan bijaksana dalam menghadapi keberagaman paham di kalangan umat Islam. Kebijakan Natsir dalam menghadapi keragaman paham umat Islam Indonesia itu diuraikan oleh K.H. Isa Anshary, sahabat seperjuangannya di Persis sekaligus murid Tuan A. Hassan. Ia menjelaskan tentang kepribadian Natsir sebagai berikut:

"Dipandang dari sudut pandang perselisihan paham Ummat Islam dalam tjangbang (furu') agama, pribadi Natsir dapat mendjadi „mushlih" dalam erti jang sedalam-dalamnja. Memang, memimpin umat Islam jang berdjenis-djenis tingkatan pikirannja dan berbagai corak paham furu' agamanja menghendaki kebidjaksanaan jang utama."¹⁹⁹

¹⁹⁶ Pemikiran radikal Persis dalam menentang berbagai praktik peribadatan yang tidak sesuai dengan dua panduan utama ajaran Islam tersebut sempat memicu polemik dengan orang-orang NU di Ciledug, Gebang, dan Bandung, akan tetapi Natsir tidak pernah dilibatkan dalam polemik-polemik tersebut. Lihat dalam Dadan Wildan Anas, *Pasang Surut Gerakan Pembaharuan Islam di Indonesia Potret Perjalanan Sejarah Organisasi Persatuan Islam (Persis)*. Bandung: Persis Press, 2000, hlm. 52; Tiar Anwar Bachtiar dan Pepen Irgan Fauzan, *Sejarah Pemikiran dan Gerakan Politik Persis*. Bandung: Persis Pers, 2019, hlm.67.

¹⁹⁷ Nama lengkapnya adalah Ahmad Hassan, ia sering dipanggil Tuan A. Hassan atau Hassan Bandung. Selengkapnya mengenai biografi Ahmad Hassan dapat dilihat dalam Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung Pemikir Islam Radikal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1994.

¹⁹⁸ Penulis tidak menjumpai satu pun data mengenai polemik Natsir dengan NU atau pemuka Islam yang lain. Natsir tidak seperti A. Hassan yang sering menulis risalah mengenai fikih dan berbicara tentang perbedaan pandangan (*furu'iyah*) fikih di hadapan umat Islam. Satu-satunya risalah fikih yang pernah ditulis Natsir adalah *Fiqhud Dakwah* (fikih dakwah).

¹⁹⁹ Lihat tulisan Isa Anshary berjudul, *Natsir Pegang Pimpinan*, majalah *Aliran Islam*, No. 14, 1949, hlm. 743.

K.H. Isa Anshary juga menyatakan bahwa Natsir adalah pengikut ajaran “Wahabi” yang menghendaki pemurnian ajaran Islam. Ia menerangkan, meskipun Natsir adalah pengikut paham “Wahabi”, ia tidak menempatkan dirinya sebagai lawan dari kelompok yang tidak sependapat dengan keyakinannya. K.H. Isa Anshary menyatakan sendiri penilaiannya atas pribadi Natsir dengan gaya bahasa yang khas. “Natsir terkenal seorang golongan kaum „muda” dan „Wahhaby” dengan huruf besar, tetapi „muda” dan „Wahhaby”nja tidak mendjadikan dirinja tidak disukai golongan jang dinamakan kolot dan kuno”.²⁰⁰

Ulasan K.H. Isa Anshary tersebut bukan sekadar penilaian supihak. Kebijakan Natsir membuatnya disukai oleh kawan-kawan yang berlainan paham dengannya. Anwar Harjono menyatakan bahwa orang yang pertama kali merekomendasikan Natsir menjadi pucuk pimpinan Masyumi pengganti Soekiman adalah K.H. Wahid Hasyim.²⁰¹ Ia merupakan salah seorang pimpinan NU dan putra K.H. Hasyim Asy’ari, perintis NU. Anwar Harjono bahkan menyatakan K.H. Wahid Hasyim pula yang meyakinkan berbagai kalangan di internal partai untuk mendukung dan memilih Natsir menjadi Ketua Umum Masyumi.²⁰²

Pada bagian ini telah diuraikan berbagai analisis yang memberikan pengaruh signifikan terhadap hubungan Masyumi dengan NU pada kurun waktu 1949-1952. Dominasi elite muda lulusan sekolah Belanda dalam struktur kepengurusan pusat Masyumi merupakan faktor yang menyebabkan posisi NU tersisihkan. Posisi NU yang saat itu lebih dominan dalam Majelis Syura merasa

²⁰⁰ *Ibid.*

²⁰¹ Lukman Hakiem, *loc cit*, hlm. 210.

²⁰² *Ibid.*

tidak lagi memiliki peranan politik yang penting seiring dengan munculnya elite muda lulusan sekolah Belanda. Kualifikasi elite muda yang enerjik, mampu berbahasa Belanda, cakap dalam urusan manajerial organisasi dan politik, serta memiliki pemahaman keislaman cenderung baik, nampaknya masih belum sepenuhnya diterima oleh sebagian ulama, khususnya NU. Isu mengenai arogansi yang ditunjukkan sebagian elite Masyumi lulusan sekolah Belanda terhadap ulama NU mulai masuk ke dalam beberapa forum NU serta menyebabkan orang-orang NU di akar rumput merasa tidak terima atas tindakan kurang sopan terhadap ulama mereka. NU memandang otoritas kepemimpinan ulama sebagai hal fundamental yang wajib dijaga karena menurut mereka ulama adalah pewaris para nabi yang wajib dihormati oleh umat Islam hingga akhir zaman.

3.2.2. Status Keanggotaan Istimewa Masyumi

Status keanggotaan istimewa Masyumi menjadi tuntutan yang secara terbuka dinyatakan NU kepada DPP Masyumi. NU merasa kurang puas atas jenis keanggotaan istimewa Masyumi yang dibiarkan tidak jelas. NU menyayangkan pembagian hak suara antara anggota perseorangan dengan anggota istimewa. NU menilai hak suara yang sama antara anggota perseorangan dengan anggota istimewa sebagai hal yang tidak adil dan cenderung tidak menghargai keberadaan organisasi-organisasi Islam yang memiliki jumlah pengikut yang banyak. NU mengklaim bahwa usulan mengenai permasalahan tersebut sudah pernah disampaikan kepada DPP Masyumi sejak 1950,²⁰³ akan tetapi tidak ditanggapi

²⁰³ Arsip PBNU berjudul *Konsepsi P.B.N.O. Mengenai N.O – Masjumi* pada 8 Mei 1952. Lihat dalam ANRI, *Inventaris Arsip Nahdlatul Ulama 1948-1979*. Jakarta, 2014, No. 2440.

oleh mereka. NU merasa apabila Masyumi ingin tetap kuat, maka pimpinan partai harus meninjau kembali jenis keanggotaan Masyumi.

NU memiliki konsepsi agar persatuan antara umat Islam dapat tetap terjaga. Opsi pertama, NU mengusulkan agar Masyumi tetap menjadi partai politik yang dibebaskan dari jenis keanggotaan bagi organisasi-organisasi Islam, kemudian dibentuk lagi badan federasi Islam yang baru. Opsi kedua, NU menawarkan agar Masyumi diubah kembali sifatnya menjadi badan federasi khusus yang tidak berpolitik seperti pada era Pendudukan Jepang, sementara umat Islam yang ingin berpolitik dipersilakan untuk membentuk partai politik baru lagi.²⁰⁴ Dua opsi berupa usulan NU di atas bukan sesuatu yang dengan sengaja dibuat untuk melemahkan kedudukan Masyumi, melainkan kesadaran NU akan realitas yang meliputi keadaan internal Masyumi yang dinilainya tidak sehat.

Ketidakpuasan NU atas posisinya di internal Partai Masyumi nampak cukup jelas menjelang 1952. K.H. Saifuddin Zuhri menerangkan bahwa dalam Konferensi Dakwah NU di Magelang pada 29 September-1 Oktober 1951, PBNU maupun pengurus NU di tingkat daerah menyatakan ketidakpuasannya terhadap Masyumi.²⁰⁵ Perasaan tidak puas kalangan NU dalam konferensi tersebut nampaknya didahului oleh perasaan tidak puas dari elite NU. PBNU terlebih dahulu membentuk Majelis Pertimbangan Politik (MPP) dalam rapat yang diselenggarakan pada 2-3 September 1951.²⁰⁶ MPP yang dibentuk pada awal September 1951 itu memiliki susunan kepengurusan sebagai berikut:

²⁰⁴ *Ibid.*

²⁰⁵ Saifuddin Zuhri, *op cit*, hlm 503.

²⁰⁶ *Ibid*, hlm. 504.

Ketua : K.H. M. Dahlan
 Sekretaris : A.A. Achsien
 Anggota : K.H. Masykur
 K.H. Abdul Wahab Chasbullah
 K.H. Muhammad Ilyas
 K.H. A. Wahid Hasyim
 K.H. Idham Chalid
 K.H. Fathurrachman Kafrawi²⁰⁷

MPP-PBNU menjadi badan khusus di internal NU yang menjalankan peran politik. K.H. Saifuddin Zuhri menerangkan, MPP bertugas untuk mengikuti dinamika perkembangan politik Indonesia, membuat analisis dan memberikan simpulannya sebagai usulan kepada PBNU. Ia menyatakan bahwa MPP harus mengambil peran politik yang ada kaitannya dengan *amar ma'ruf nahi munkar* dan tujuan serta pelaksanaannya harus selaras dengan tujuan NU.²⁰⁸ Deliar Noer menyatakan bahwa pembentukan MPP oleh PBNU merupakan suatu cara untuk mempersiapkan NU sebagai partai tersendiri, karena menurutnya setelah NU bertransformasi menjadi partai politik, MPP dihapuskan.²⁰⁹

Gugatan NU terhadap jenis keanggotaan Masyumi dapat lebih dipahami jika dihubungkan dengan dinamika internal partai tersebut. Elite muda Masyumi sekali pun mereka pernah terlibat dalam sejumlah organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Persis, namun, pada saat itu mereka bukan termasuk pada orang-orang yang mewakili anggota-anggota istimewa partai. Mereka aktif dalam Masyumi sebagai elite perseorangan. NU semakin merasa tidak senang ketika elite perseorangan itu rupanya memiliki pengaruh besar di internal partai dibandingkan dengan anggota istimewa yang memiliki massa lebih banyak. NU

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 505.

²⁰⁹ Deliar Noer, *op cit.*, hlm. 90

juga nampaknya beranggapan bahwa Masyumi yang didirikan pada 7 November 1945 memiliki sifat yang sama seperti MIAI dan Masyumi Jepang. Dua badan tersebut merupakan federasi yang mewadahi organisasi-organisasi Islam pada era Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan Pemerintahan Militer Jepang.

Dominasi elite muda Masyumi menyebabkan NU merasa tidak nyaman dengan kultur organisasi partai yang mulai condong dibawa menuju ke arah yang lebih bebas dan egaliter. NU menilai dominasi elite muda Masyumi dapat mengancam otoritas kepemimpinan ulama dalam Majelis Syura. Otoritas kepemimpinan ulama bagi NU merupakan hal fundamental yang mesti dijaga dan dihormati, oleh karena itu, NU tidak menerima segala bentuk marginalisasi terhadap peran ulama. Hal tersebut nampak selaras dengan motif pembentukan NU pada 31 Januari 1926. NU dibentuk sebagai respon atas masifnya gerakan organisasi Islam modern yang egaliter dan cenderung tidak menempatkan ulama pada kedudukan tertinggi.

Perubahan struktur kepengurusan pusat Masyumi pada 1949 terbukti mendapatkan penolakan dari sebagian anggota-anggotanya. Hal tersebut menandakan bahwa perubahan organisasi dapat menyebabkan reaksi, baik itu berupa dukungan maupun penolakan. Akin dan Palmer menyatakan bahwa perubahan organisasi disebabkan oleh berbagai situasi, salah satunya adalah kekuatan internal yang meliputi persoalan sumber daya manusia dan perilaku pengelola yang mendorong perubahan di dalam organisasi. Teori yang dikemukakan oleh Akin dan Palmer tersebut cukup relevan dalam menggambarkan hubungan Masyumi dengan NU pada kurun waktu 1949-1952.